

Pendampingan Strategi Pendapatan Asli Daerah Berbasis Data bagi Pemerintah Kota Baubau

¹⁾Eko Satria*, ²⁾Wa Ode Adriani Hasan, ³⁾Anwar Sadat, ⁴⁾Herman Lawelai, ⁵⁾La Ode Sardiman

^{1,5)}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

^{3,4)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

Email Corresponding: kizsatria@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRACT
Kata Kunci: Pemetaan Potensi Pajak Pendapatan Asli Daerah Collaborative Governance Dokumen Strategis Fiskal Kemandirian Fiskal Daerah	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pemetaan potensi pajak daerah, keterbatasan integrasi data antar perangkat daerah, serta rendahnya penggunaan analisis fiskal dalam penyusunan target pendapatan daerah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendampingan penyusunan dokumen strategis potensi PAD berbasis data. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis fiskal, dan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini melibatkan aparatur dari beberapa organisasi perangkat daerah yang berkontribusi terhadap pengelolaan PAD Kota Baubau. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya dokumen kajian potensi PAD yang memuat analisis potensi pajak daerah, proyeksi penerimaan, identifikasi sektor prioritas, dan rekomendasi kebijakan peningkatan PAD. Pendampingan juga meningkatkan pemahaman aparatur mengenai penggunaan instrumen analisis fiskal, seperti elastisitas PAD, analisis kontribusi sektor ekonomi, dan proyeksi penerimaan daerah dalam penyusunan target pendapatan daerah. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Keywords: Local Tax Mapping Local Own-Source Revenue Collaborative Governance Strategic Fiscal Document Regional Fiscal Independence	Baubau City's Local Own-Source Revenue (PAD) management continues to face various challenges, such as suboptimal mapping of regional tax potential, limited data integration between regional agencies, and low fiscal analysis utilization in setting regional revenue targets. This community service program aims to strengthen the capacity of local government officials through assistance in developing strategic data-based PAD potential documents. The implementation method is participatory, involving preparation, data collection, fiscal analysis, and Focus Group Discussions (FGDs) with the Regional Revenue Agency and relevant regional agencies. This activity involved officials from several regional government organizations that contribute to Baubau City's PAD management. The results of the activity indicate the preparation of a PAD potential study document containing an analysis of regional tax potential, revenue projections, identification of priority sectors, and policy recommendations for increasing PAD. The assistance also increased officials' understanding of the use of fiscal analysis instruments, such as PAD elasticity, analysis of economic sector contributions, and regional revenue projections in setting regional revenue targets. This activity strengthens collaboration between universities and local governments in supporting more effective and sustainable fiscal governance.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

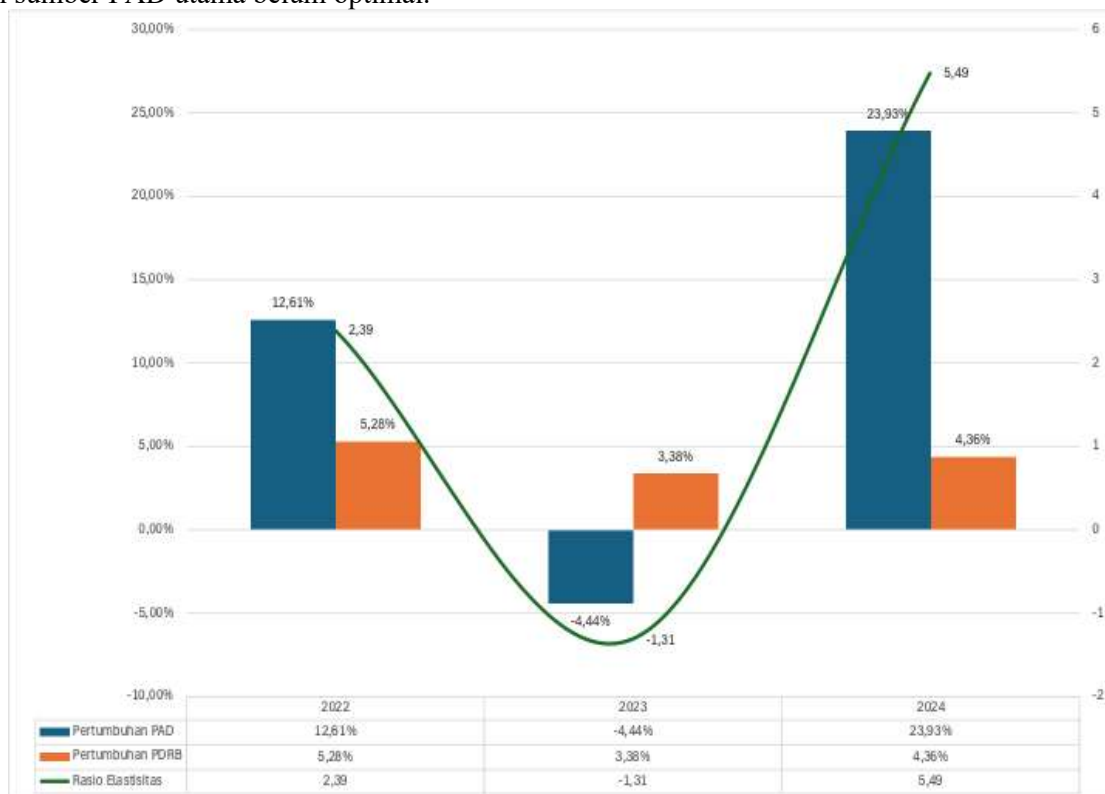
I. PENDAHULUAN

Dalam perspektif good governance dan desentralisasi fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan (Liu et al., 2022; Song & Zhao, 2024). Konsep tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 8 tentang Decent

Work and Economic Growth, Tujuan 11 tentang Sustainable Cities and Communities, serta Tujuan 16 tentang Peace, Justice, and Strong Institutions yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pembangunan daerah (Hope Sr., 2020; Zehri et al., 2024). Dalam konteks nasional, penguatan kapasitas fiskal daerah juga sejalan dengan arah pembangunan dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama pada agenda penguatan reformasi birokrasi, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (Kostecki, 2023; Lewis, 2023; Sutrisno, 2025). Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Baubau melalui visi “Kerja Bersama” menempatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai fondasi pembangunan daerah, termasuk dalam penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public (Fitriyani et al., 2021; Petkovšek et al., 2021). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat (Kamal et al., 2025). Dalam konteks otonomi daerah, optimalisasi PAD menjadi agenda strategis karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal, perluasan ruang fiskal daerah, serta kemampuan pemerintah daerah membiayai prioritas pembangunan secara berkelanjutan (Kuang, 2025; Kus Pratiwi et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya dipandang sebagai target pendapatan semata, tetapi juga sebagai ukuran kapasitas tata kelola pemerintahan daerah (Dharsana et al., 2023; Purwoko, 2025; Ristanti et al., 2025).

Kota Baubau sebagai salah satu daerah perkotaan yang berkembang di kawasan timur Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah. Posisi strategis Baubau sebagai simpul perdagangan dan distribusi antarwilayah di kawasan kepulauan semestinya dapat menjadi basis peningkatan penerimaan daerah, khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian, hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa struktur PAD masih cenderung ditopang oleh komponen lain-lain PAD yang sah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD utama belum optimal.



Gambar 1. Tren Petumbuhan

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau Tahun 2022–2024.

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan PDRB	Rasio Elastisitas
2022	106.347.108.916	12,61%	5,28	2,39
2023	101.622.709.638	-4,44%	3,38	-1,31
2024	125.945.342.415	23,93%	4,36	5,49

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau

Tabel di atas menampilkan perbandingan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Baubau selama periode 2022–2024. Data ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana peningkatan kinerja PAD selaras dengan perkembangan aktivitas perekonomian daerah. Visualisasi grafik di bawah ini menunjukkan dinamika pertumbuhan kedua indikator tersebut serta mengilustrasikan tren yang dapat menjadi dasar dalam menilai tingkat kemandirian fiskal dan respons pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika melihat elastisitas Pajak Daerah terhadap PAD, hubungan yang terbentuk cenderung tidak konsisten. Pada tahun 2022 nilai elastisitas sebesar 0,77 menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan PAD meskipun bersifat inelastis. Sementara pada 2023 nilai elastisitas bernilai negatif $-0,42$ yang menunjukkan penurunan penerimaan pajak yang tidak sejalan dengan perkembangan PAD, bahkan pada 2024 elastisitasnya hanya sebesar 0,01 yang berarti peningkatan pajak hampir tidak memberikan dorongan bagi pertumbuhan PAD. Kondisi ini menggambarkan bahwa sumber pertumbuhan PAD pada beberapa tahun tampaknya lebih banyak berasal dari komponen selain pajak daerah.

Tabel 2. Kontribusi Jenis Pendapatan Asli Daerah di Kota Baubau Tahun 2022-2024

Jenis PAD	Tahun		
	2024	2023	2022
Pajak Daerah	29,44%	36,44%	34,17%
Retribusi Daerah	5,09%	6,41%	6,10%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan	8,58%	8,42%	7,47%
Lain-Lain PAD yang Sah	56,89%	48,73%	52,26%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Data Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau

Berdasarkan data table di atas mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Hal ini tercermin dari perkembangan PAD Kota Baubau selama periode 2022–2024 yang menunjukkan fluktuasi cukup tajam. Pada tahun 2022, PAD tercatat sebesar Rp106,35 miliar dengan pertumbuhan 12,61%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB sebesar 5,28%, sehingga menghasilkan rasio elastisitas 2,39. Namun pada tahun 2023, PAD justru menurun menjadi Rp101,62 miliar atau berkontraksi sebesar $-4,44\%$, padahal PDRB masih tumbuh 3,38%, dengan rasio elastisitas negatif sebesar $-1,31$. Selanjutnya pada tahun 2024, PAD kembali meningkat signifikan menjadi Rp125,95 miliar dengan pertumbuhan 23,93%, jauh melampaui pertumbuhan PDRB sebesar 4,36%, sehingga rasio elastisitas melonjak menjadi 5,49. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan penerimaan PAD masih belum stabil.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan target anggaran, tetapi membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi fiskal aparatur, pemanfaatan data potensi pendapatan, serta perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang tepat sasaran (Nie, 2025; Ullah et al., 2021; Widya Nuriyanti et al., 2025). Dalam praktiknya, aparatur pengelola pendapatan daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemetaan objek pajak dan retribusi, belum optimalnya analisis kinerja penerimaan, lemahnya integrasi data antarinstansi, serta terbatasnya penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti empiris (Irwan et al., 2022; Nie, 2025; W Jabid et al., 2023).

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya umumnya masih berfokus pada sosialisasi perpajakan daerah, pelatihan administrasi pengelolaan keuangan, atau peningkatan pemahaman aparatur secara umum tanpa didukung penyusunan instrumen kebijakan fiskal yang berbasis data empiris daerah (Puspaningtyas & Izzalqurny, n.d.). Berbeda dengan kegiatan tersebut, pengabdian ini menekankan

pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pendampingan penyusunan dokumen strategis optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis analisis potensi ekonomi daerah, proyeksi penerimaan, dan identifikasi sektor prioritas. Pendekatan ini mengintegrasikan collaborative governance antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga menghasilkan instrumen teknokratis yang dapat dimanfaatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas kepada perangkat daerah terkait pengelolaan PAD di Kota Baubau. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai strategi optimalisasi PAD, memperkuat kemampuan analisis potensi pendapatan, serta mendorong penerapan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan terbangun sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi berbasis keilmuan terhadap persoalan fiskal daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan peningkatan PAD, sehingga mendukung terwujudnya kemandirian fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Baubau.

II. MASALAH

Kota Baubau sebagai salah satu daerah perkotaan berkembang di kawasan timur Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, pariwisata, serta usaha mikro kecil dan menengah. Posisi strategis Kota Baubau sebagai pusat distribusi dan perdagangan antarwilayah seharusnya mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan PAD masih menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada belum optimalnya kemandirian fiskal daerah.

Permasalahan utama yang ditemukan pada lokasi pengabdian berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Secara lebih spesifik, permasalahan yang dihadapi meliputi: (1) belum optimalnya pemetaan objek pajak dan retribusi daerah yang menyebabkan potensi penerimaan daerah belum teridentifikasi secara menyeluruh; (2) belum terintegrasinya data penerimaan antar perangkat daerah sehingga proses sinkronisasi dan analisis potensi PAD masih mengalami kendala; (3) penyusunan target PAD yang masih cenderung menggunakan pendekatan berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan belum berbasis analisis potensi ekonomi daerah; serta (4) masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam menggunakan instrumen analisis fiskal daerah, seperti analisis elastisitas PAD, kontribusi sektor ekonomi, dan proyeksi penerimaan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengonversi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi peningkatan penerimaan PAD yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, perangkat daerah pengelola pendapatan masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya pemetaan objek pajak dan retribusi, keterbatasan integrasi data antarinstansi, lemahnya analisis potensi penerimaan daerah, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam melakukan pengelolaan PAD berbasis data. Perbedaan capaian penerimaan antar perangkat daerah juga menunjukkan masih adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dan efektivitas tata kelola pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi lapangan bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, ditemukan bahwa proses pengelolaan data potensi pajak daerah masih belum terintegrasi secara optimal antar perangkat daerah. Sebagian besar data objek pajak dan retribusi masih tersebar pada masing-masing organisasi perangkat daerah sehingga menyulitkan proses sinkronisasi data penerimaan daerah secara menyeluruh. Selain itu, proses penyusunan target PAD masih cenderung menggunakan pendekatan incremental budgeting berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya didukung analisis potensi ekonomi sektoral maupun proyeksi penerimaan berbasis data empiris daerah.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa aparatur pengelola PAD masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan instrumen analisis fiskal seperti rasio elastisitas PAD, analisis kontribusi sektor ekonomi, proyeksi penerimaan, dan pemetaan potensi pajak daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya identifikasi sektor prioritas penerimaan daerah serta terbatasnya penyusunan kebijakan peningkatan PAD yang lebih terukur dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu,

diperlukan kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan guna mendukung pengelolaan PAD yang lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan FGD Penyusunan Dokumen Potensi Pajak Daerah Kota Baubau

III. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data, melalui pelibatan tenaga ahli yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Buton pada kegiatan yang terselenggara dari Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Kegiatan difokuskan pada penyusunan Dokumen Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak di Kota Baubau sebagai dasar peningkatan kemandirian fiskal daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pekerjaan persiapan, pengumpulan data, dan analisa data.

1. Tahap Pekerjaan Persiapan

Tahap awal dilakukan melalui konsolidasi tim pelaksana, pembagian tugas, serta penyusunan metode kerja. Tim juga melakukan inventarisasi data sekunder berupa laporan PAD, data PDRB, regulasi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan. Selanjutnya disusun laporan pendahuluan yang memuat rencana kerja, kebutuhan data, serta jadwal kegiatan. Tahap ini ditutup dengan kick off meeting bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau untuk menyamakan persepsi, menetapkan ruang lingkup kegiatan, dan memperkuat komitmen kerja sama.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal, koordinasi lapangan, serta penghimpunan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan sumber-sumber PAD. Data dikumpulkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau serta perangkat daerah terkait yang berkontribusi secara langsung terhadap PAD di Kota Baubau.

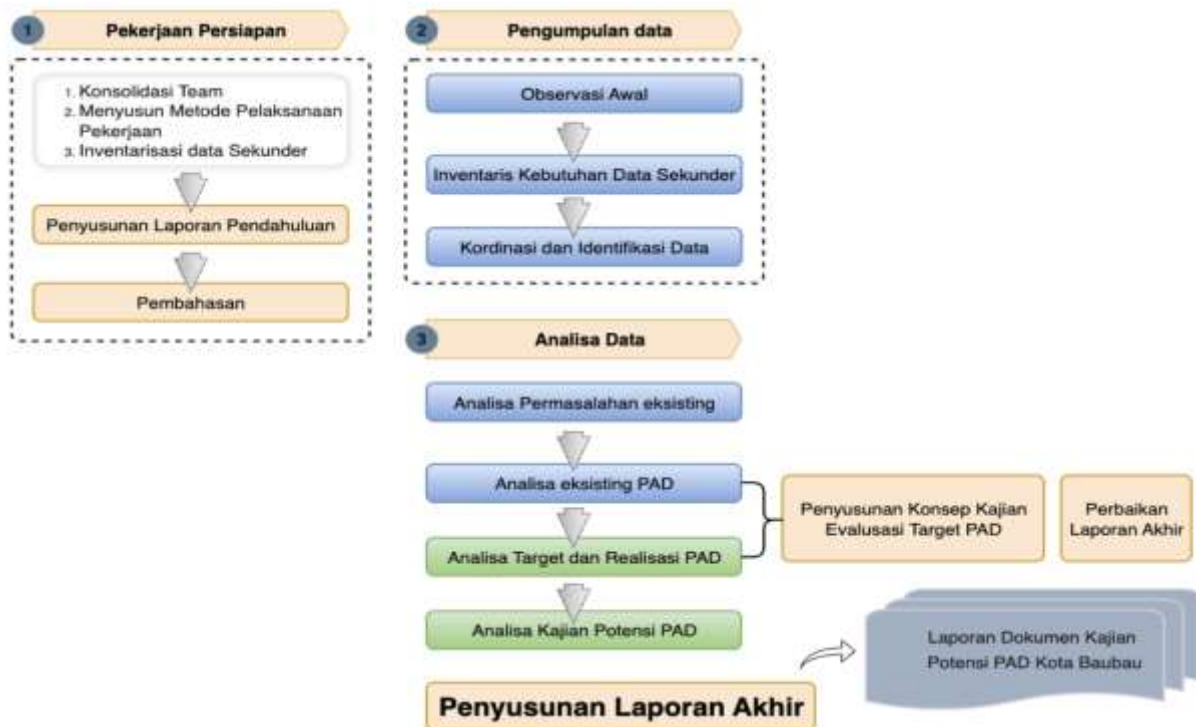
3. Tahap Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan eksisting, mengevaluasi struktur PAD, membandingkan target dan realisasi penerimaan, serta menghitung potensi PAD daerah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan pertumbuhan, kontribusi, efektivitas, dan proyeksi penerimaan. Hasil analisis selanjutnya dibahas bersama mitra melalui forum diskusi untuk memperoleh masukan dan validasi data. Setelah itu disusun laporan akhir berupa Dokumen Kajian Potensi PAD Kota Baubau.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui perhitungan pertumbuhan PAD, rasio kontribusi, rasio efektivitas, serta elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan potensi PAD dilakukan menggunakan pendekatan makro satu titik dengan mengacu pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis proyeksi penerimaan dilakukan melalui penyusunan skenario optimis, moderat, dan pesimis

berdasarkan tingkat peluang dan hambatan masing-masing jenis pajak daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh estimasi potensi penerimaan yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi fiskal daerah.

Secara keseluruhan metode pelaksanaan kegiatan tersebut divisualisasikan dan dapat dilihat pada alur berikut :



Gambar 3. Diagram Alir Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Pajak Daerah.

Luaran utama kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Potensi PAD Kota Baubau yang memuat kondisi eksisting penerimaan daerah, potensi PAD, evaluasi target, dan rekomendasi kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Tahap akhir kegiatan dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tim tenaga ahli, Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, serta perangkat daerah terkait. FGD bertujuan untuk memvalidasi hasil analisis, memperoleh masukan teknis dari pemangku kepentingan, serta menyepakati rumusan strategi peningkatan pajak daerah. Melalui forum ini disusun Dokumen Potensi Pajak Daerah Kota Baubau yang memuat pemetaan potensi, analisis permasalahan, proyeksi penerimaan, dan rekomendasi kebijakan strategis. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD secara terukur dan berkelanjutan.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi perangkat daerah, keterlibatan peserta dalam proses diskusi, serta kemampuan aparatur dalam memahami penggunaan instrumen analisis fiskal daerah. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi tersusunnya dokumen kajian potensi PAD, meningkatnya pemahaman aparatur mengenai analisis potensi pajak daerah, serta tersusunnya rekomendasi strategis peningkatan PAD berbasis data. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui umpan balik peserta FGD terkait relevansi materi pendampingan dan manfaat dokumen yang dihasilkan terhadap kebutuhan perencanaan fiskal daerah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui pendampingan penyusunan dokumen strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Baubau. Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara tim akademisi Universitas Muhammadiyah Buton dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau sebagai mitra utama. Pendekatan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai sumber pengetahuan dan pemerintah daerah

sebagai pelaksana kebijakan, sehingga tercipta hubungan sinergis dalam penyelesaian persoalan fiskal daerah.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan penyusunan dokumen strategis PAD memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman aparaturnya daerah mengenai analisis fiskal dan pemetaan potensi pajak daerah. Aparatur yang sebelumnya masih menggunakan pendekatan target berbasis capaian tahun sebelumnya mulai memahami pentingnya penggunaan analisis potensi ekonomi, elastisitas PAD, dan proyeksi penerimaan dalam penyusunan target pendapatan daerah.

Selain itu, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mendorong meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyediaan dan sinkronisasi data PAD. Kegiatan ini juga menghasilkan dokumen kajian potensi PAD yang memuat sektor prioritas penerimaan daerah, proyeksi pendapatan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan fiskal daerah secara lebih terukur dan berbasis data.

Berdasarkan hasil umpan balik peserta kegiatan, aparaturnya daerah menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan membantu meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan instrumen analisis fiskal daerah serta memperkuat kapasitas dalam mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang sebelumnya belum terpetakan secara optimal.

Dalam kajian ini, penggunaan metode tren sebagai pendekatan perhitungan tidak memungkinkan karena keterbatasan data yang tersedia. Oleh sebab itu, estimasi potensi PAD dilakukan melalui pendekatan makro satu titik, yaitu dengan mengasumsikan bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir dapat dijadikan sebagai indikasi potensi pajak untuk tahun berikutnya. Rumus proyeksi realisasi pajak daerah yang digunakan disajikan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Perkiraan Realisasi 2025} = \text{Realisasi Triwulan III} \times \text{Pertumbuhan Ekonomi}$$

Potensi PAD tahun 2026 dihitung dengan cara mengalikan perkiraan realisasi penerimaan tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Baubau. Dalam perhitungan ini diasumsikan bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah cenderung mengikuti pola pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota Baubau. Rumus perhitungan potensi pajak daerah tahun 2026 dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Daerah (2026)} = \text{Perkiraan Realisasi (2025)} \times \text{Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi}$$

Penentuan PAD tahun 2026 dilakukan melalui tiga skenario, yaitu optimis, moderat, dan pesimis, yang disusun berdasarkan tingkat hambatan dari masing-masing jenis penerimaan. Untuk tahun 2027 hingga 2030, potensi pajak dihitung menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan tahun 2026, namun nilai realisasi tahun sebelumnya diperoleh dari estimasi potensi moderat pada tahun sebelumnya yang diasumsikan sebagai realisasi aktual. Target setiap jenis pajak daerah tidak ditetapkan secara seragam, melainkan dengan mempertimbangkan peluang dan kendala di masing-masing sektor. Dengan cara tersebut, target pajak daerah tahun 2022, misalnya, diperoleh dengan mengalikan potensi pajak daerah tahun 2022 dengan persentase tertentu yang mencerminkan bobot peluang dan hambatan pada setiap jenis pajak daerah. Rumus umum perhitungan target pajak daerah dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Target (tahun } x) = \text{Potensi (tahun } x) \times \text{Persentase Bobot}$$

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau adalah penentuan target penerimaan daerah yang masih cenderung menggunakan pendekatan administratif berdasarkan capaian tahun sebelumnya dan belum didukung analisis potensi fiskal yang terukur. Kondisi tersebut menyebabkan target PAD belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas riil potensi ekonomi daerah maupun tingkat pertumbuhan sektor-sektor strategis yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Melalui kegiatan pendampingan ini, tim pengabdian memperkenalkan pendekatan proyeksi penerimaan PAD berbasis data dengan menggunakan skenario pesimis, moderat, dan optimis

sebagai dasar penyusunan target pendapatan daerah. Pendekatan tersebut dilakukan melalui analisis pertumbuhan ekonomi daerah, identifikasi sektor prioritas, serta pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa aparaturnya daerah mulai memahami pentingnya penggunaan analisis fiskal dalam penentuan target PAD secara lebih realistis dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskalnya agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut membutuhkan upaya menggali sumber-sumber pajak serta retribusi secara lebih optimal. Peningkatan potensi pajak dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, integritas aparaturnya pemungut pajak, kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemungutan, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan data yang akurat mengenai objek pajak. Sejalan dengan itu, agar pemanfaatan sumber penerimaan daerah lebih optimal, diperlukan analisis terhadap potensi ekonomi dari setiap sektor. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Adapun yang dapat dihasilkan dalam kegiatan penyusunan dokumen tersebut adalah :

1. Tersusunnya Dokumen Strategis Peningkatan PAD

Hasil utama kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Peta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau Tahun 2025 yang memuat dasar hukum, kondisi makro daerah, analisis potensi pajak daerah, target dan sasaran, serta strategi peningkatan PAD berbasis data. Dokumen tersebut menjadi instrumen teknokratis yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan target penerimaan, evaluasi kebijakan, serta pengambilan keputusan fiskal yang lebih terukur.

Keberadaan dokumen ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan rekomendasi normatif, tetapi juga menciptakan produk kebijakan aplikatif yang dapat langsung dimanfaatkan oleh mitra. Dalam perspektif pemberdayaan kelembagaan, keluaran semacam ini penting karena memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Penguatan Kapasitas Aparatur melalui Transfer Pengetahuan

Selama proses pendampingan, tim pengabdian memperkenalkan berbagai instrumen analisis fiskal seperti tax ratio, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, elastisitas PAD terhadap PDRB, rasio kontribusi, analisis tren, dan analisis proyeksi. Penggunaan instrumen tersebut memberikan pemahaman baru kepada aparaturnya daerah bahwa pengelolaan PAD harus dilakukan secara berbasis data, bukan sekadar mengikuti pola target tahunan.

Dari sudut pandang capacity building, kegiatan ini meningkatkan kemampuan teknis aparaturnya dalam membaca pola penerimaan daerah, mengidentifikasi gap potensi pajak, serta menyusun strategi peningkatan PAD yang lebih realistis. Penguatan kapasitas seperti ini menjadi kebutuhan penting karena banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan metode analisis keuangan daerah secara komprehensif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Baubau ditopang oleh sektor perdagangan (22,61%), konstruksi (20,05%), serta pertanian dan perikanan (15,17%). Temuan ini memiliki arti strategis karena menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan PAD perlu diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan temuan tersebut, potensi peningkatan PAD dapat difokuskan pada: pajak restoran dan hotel dari pertumbuhan perdagangan dan jasa; BPHTB dan PBB-P2 dari perkembangan sektor konstruksi dan properti; retribusi pasar dan usaha mikro dari aktivitas perdagangan lokal; pajak reklame dan parkir dari pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yaitu kebijakan fiskal dibangun berdasarkan kondisi empiris ekonomi daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini juga memperlihatkan praktik collaborative governance, yaitu kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan publik. Perguruan tinggi menyediakan keahlian akademik, metodologi analisis, dan rekomendasi kebijakan, sementara pemerintah daerah menyediakan data, akses kelembagaan, serta kebutuhan praktis lapangan.

Model kolaborasi seperti ini penting karena persoalan PAD sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan birokrasi internal. Diperlukan dukungan aktor eksternal yang independen dan memiliki

kapasitas ilmiah. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan kolaboratif di daerah.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan dokumen strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Kegiatan ini berhasil menghasilkan dokumen kajian potensi PAD yang memuat analisis potensi pajak daerah, proyeksi penerimaan, sektor prioritas, serta rekomendasi kebijakan peningkatan PAD yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan fiskal daerah secara lebih terukur. Selain itu, pendampingan yang dilakukan turut meningkatkan pemahaman aparatur mengenai penggunaan instrumen analisis fiskal dalam penyusunan target pendapatan daerah. Ke depan, optimalisasi PAD perlu didukung melalui penguatan integrasi data antar perangkat daerah, pengembangan sistem informasi pajak daerah berbasis digital, pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi, serta pelaksanaan pelatihan analisis fiskal secara berkelanjutan bagi aparatur pengelola pendapatan daerah. Langkah tersebut penting untuk mendukung pengelolaan PAD yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau selaku pelaksana kegiatan penyusunan Dokumen Kajian Potensi Pajak yang berkontribusi langsung pada capaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau yang telah memberikan dukungan, fasilitasi data, serta ruang kolaborasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada akademisi Universitas Muhammadiyah Buton yang terlibat sebagai tenaga ahli dalam memberikan pendampingan, analisis, dan rekomendasi strategis terkait penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola fiskal daerah yang lebih efektif dan berbasis data, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas pembangunan daerah, serta peningkatan kemandirian fiskal yang berkelanjutan di Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharsana, M. T., Nirwana, N., Mediaty, M., Rasyid, S., Rura, Y., Nagu, N., Mahyuddin, N. I., & Syarif, Muh. N. I. (2023). Meningkatkan Efisiensi Penatausahaan Belanja Daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 203–210. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2425>
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Metro. *FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 4(1). <https://doi.org/10.24127/jf.v4i1.599>
- Hope Sr., K. R. (2020). Peace, justice and inclusive institutions: Overcoming challenges to the implementation of Sustainable Development Goal 16. *Global Change, Peace & Security*, 32(1), 57–77. <https://doi.org/10.1080/14781158.2019.1667320>
- Irwan, A. L., Haryanto, H., & Ansar, M. C. (2022). A Study of Prospective Local Own-Source Revenues in Central Mamuju, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 78–94. <https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7271>
- Kamal, K., Darmadi, D., & Idrus, I. A. (2025). Constraining Autonomy: How Bureaucratic Dysfunctions Impede Regional Financial Independence in a Decentralized Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 11(3), 275. <https://doi.org/10.35308/jpp.v11i3.11776>
- Kostecki, D. (2023). Administrative Law Values – Attempts at Methodological Order. *Studia Iuridica Lublinensia*, 32(5), 239–248. <https://doi.org/https://10.17951/sil.2023.32.5.239-248>
- Kuang, L. (2025). Rule of Law Principles and Practical Paths of Public Finance Construction. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 23(4). (pub.1191460566). <https://doi.org/10.52152/3164>
- Kus Pratiwi, D., Rahma Novikasari, S., Ayuningtyas Harahap, N., & Wahyuningsih, A. (2023). Fiscal Decentralization in Indonesia: Does Discretionary Policy on Tax Facilities Remain Urgent? *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13349>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>

- Liu, R., Zhang, X., & Wang, P. (2022). A Study on the Impact of Fiscal Decentralization on Green Development from the Perspective of Government Environmental Preferences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 9964. <https://doi.org/10.3390/ijerph19169964>
- Nie, C. (2025). Financial Law Governance Measures for Local Government Debt Risk. *Financial Engineering and Risk Management*, 8(2), 137–141. (pub.1193187424). <https://doi.org/10.23977/ferm.2025.080215>
- Petkovšek, V., Hrovatin, N., & Pevcin, P. (2021). Local Public Services Delivery Mechanisms: A Literature Review. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 19(1), 39–64. [https://doi.org/10.4335/19.1.39-64\(2021\)](https://doi.org/10.4335/19.1.39-64(2021))
- Purwoko, A. (2025). Optimizing the Role of Deputy Regional Heads in Community Service in the Era of Fiscal Constraints. *Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP)*, 4(3), 111–120. <https://doi.org/10.55927/jpp.v4i3.485>
- Puspaningtyas, M., & Izzalqurny, T. R. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa Menuju Desa Mandiri di Kota Malang*.
- Ristanti, R., Anwar, C., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian dan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 77–82. <https://doi.org/10.55732/ncer.v3i1.1379>
- Song, W., & Zhao, K. (2024). Navigating the innovation policy dilemma: How subnational governments balance expenditure competition pressures and long-term innovation goals. *Heliyon*, 10(15), e34787. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34787>
- Sutrisno, E. (2025). The Effectiveness of Good Governance Laws in Public Administration. *Journal of Law and Regulation Governance*, 3(5), 199–207. <https://doi.org/http://10.57185/jlarg.v3i5.109>
- Ullah, A., Kui, Z., Ullah, S., Pinglu, C., & Khan, S. (2021). Sustainable Utilization of Financial and Institutional Resources in Reducing Income Inequality and Poverty. *Sustainability*, 13(3), 1038. <https://doi.org/10.3390/su13031038>
- W Jabid, A., Suwito, S., & Darwis, H. (2023). Optimization of receiving tax and retribution in Ternate, North Maluku, Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 12(7), 312–322. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i7.2844>
- Widya Nuriyanti, Muhammad Halilintar, & Syaiful. (2025). National Economic Transformation Strategy Towards Indonesia Emas 2045 Based on Digital Technology and Creative Economy. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 4(6), 1141–1150. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i6.380>
- Zehri, C., Bendahmane, M. E. A., Amina, K., Zgarni, I., & Sekrafi, H. (2024). Decent work, financial inclusion, and economic growth: Analysis under the SDG 8. *Heritage and Sustainable Development*, 6(1), 194–218. <https://doi.org/10.37868/hsd.v6i1.370>